

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan pembangunan sejatinya harus memiliki kriteria yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif, serta terintegrasi satu sama lain, hingga kesenjangan yang terjadi pada pembangunan di daerah saat ini dapat teratasi. Guna mengatasi tertinggalnya satu daerah dengan daerah lain di daerah tersebut sudah menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Daerah. Dalam sebuah pembangunan diperlukan suatu pembangunan yang menyeluruh, mulai dari pembangunan sektor kecil pembangunan tingkat desa dengan berbagai faktor permasalahan di desa yang dilanjut ke tingkat permasalahan yang lebih tinggi ke tingkat Kabupaten/Kota dan nasional.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mencapai target *Millenium Developments Goal* dalam bidang air minum serta sanitasi (WSS-MDG), dimana akan menaruh setengah dari proporsi masyarakat yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Beriringan dengan hal ini pemerintah Indonesia menjalankan suatu program yang dinamakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dimana program ini merupakan salah satu program nasional yang diselenggarakan secara terstruktur oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah guna meningkatkan akses penduduk pedesaan dan pinggiran kota dalam fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan melakukan pendekatan berbasis pada masyarakat.

Program ini sudah dijalankan mulai tahun 2008, dan hingga pada tahun 2012 telah dapat memberikan peningkatan dalam layanan air minum dan sanitasi, serta berhasil untuk mencapai nilai dan juga perilaku dalam hidup bersih dan sehat di sejumlah 6800 Desa/Kelurahan yang berada pada 110 Kabupaten maupun Kota.

Guna peningkatan akses dari penduduk yang berada di pedesaan dan juga pinggiran kota akan fasilitas air minum dan sanitasi dalam tujuan untuk mencapai target *Millenium Development Goals*, prgram yang satu ini kemudian dilanjutkan di tahun 2013 sampai tahun 2016. Dalam program Pamsimas periode II ini dilaksanakan guna memenuhi dua tujuan dalam agenda nasional antara lain peningkatan terhadap pelayanan air minum kepada masyarakat dan sanitasi dengan kriteria layak yakni air bersih untuk masyarakat dan juga sanitasi total berbasis masyarakat.

Sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, untuk urusan pelayanan air bersih dan sanitasi sudah tentu jadi urusan wajib dari pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan wajib dari pemda ini berpacu pada Standar Pelayanan Maskimal (SPM) yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah. Untuk mendukung kinerja dari pemerintah daerah sendiri dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi kriteria SPM, program Pamsimas ini berperan untuk menyediakan kebutuhan finansial baik dalam investasi yang berbentuk seperti sarana dan prasarana, dan juga inestasi lain seperti manajemen dukungan teknis dan pengembangan kapasitas.

Pembangunan yang memiliki basis pada pedesaan begitu penting dan juga perlu dalam penguatan pondasi perekonomian pada sebuah negara, pemberantasan kemiskinan dan berkurangnya kesenjangan yang ada pada setiap daerah. Hal tersebut diperlukan untuk mengubah suatu kondisi dan situasi seperti saat ini yang dirasa kurang baik kearah yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan desa sendiri dapat melalui beberapa program misalnya listrik masuk desa, pembangunan jalan dan jembatan, Pamsimas, dan pembangunan gedung sekolah.

Menurut Edi Suharto pembangunan dan kebijakan merupakan dua buah konsep yang berkaitan satu sama lain. Kebijakan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sedangkan pembangunan sendiri adalah konteks dari kebijakan pembangunan tersebut dioperasikan. Kebijakan merujuk pada sebuah kerangka kerja pembangunan yang memberi pedoman dalam implementasi dari tujuan pembangunan ke berbagai program dan juga proyek.

Sebagai salah satu negara yang termasuk dalam kelompok negara berkembang sampai sekarang, pemerintah Indonesia masih terus berupaya dalam peningkatan agar masyarakatnya mencapai tingkat kesejahteraan. Seperti halnya dalam pemberdayaan masyarakat dimana merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah satu tindakan dalam proses mendampingi, memberikan edukasi serta memfasilitasi masyarakat yang dinilai terdapat permasalahan dalam lingkungannya. Sehingga masyarakat nantinya akan mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri sebagai contohnya masalah yang sering muncul yaitu dalam hal perekonomian,

pendidikan dan kesehatan.

Pada hakikatnya pemberdayaan itu tidak selalu terpusat pada sebuah masalah ekonomi saja, tapi juga tentang bagaimana masalah kesehatan yang ada di masyarakat pula. Pada tiap negara yang ada pastinya akan selalu memberi warga negaranya pelayanan guna mengatasi masalah yang timbul tersebut, seperti masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat yang terdapat di pelosok daerah. Pemerintah Indonesia sudah memberi pelayanan bidang kesehatan terutama menyoal dalam air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Tapi dikarenakan adanya kualitas air sungai dan juga sumber air bersih yang dimana semakin hari semakin tidak layak digunakan bahkan sulit untuk didapatkan. Maka pemerintah mengupayakan tentang adanya program-program pemerintah layaknya prgram dari PDAM. Namun melihat fakta yang ada untuk hal penyediaan sarana serta prasarana air minum dan sanitasi di Indonesia hingga sekarang ini belum juga terpenuhi secara optimal. Hingga saat ini terpantau masih banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi dasar.

Kualitas lingkungan dan kesehatan yang buruk serta air yang tidak aman dikonsumsi menyebabkan masalah kesehatan masyarakat seperti diare bahkan kematian.¹ Timbulnya masalah tersebut mebuat pemerintah membentuk sebuah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional. POKJA AMPL ini didirakn leh pemerintah pada tahun 1997 dengan manjadi suatu wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan

¹ Pamsimas, "pelaksanaan stbm dalam PAMSIMAS" diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 20.00

air minum dan sanitasi berjalan secara lebih baik. Dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi. Selain hal itu pembentukan POKJA ini juga guna meningkatkan koordinasi yang terlaksana antar lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pembangunan Air Minum dan Sanitasi.

POKJA AMPL sendiri memiliki berbagai program seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau yang biasa disebut PAMSIMAS, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman (PPSP), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang juga dikenal dengan STBM, NAWASIS dan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).² Dalam penelitian kali ini peneliti sendiri lebih memfokuskan pada satu program dari beberapa program tersebut yaitu PAMSIMAS. Program Pamsimas adalah salah satu bentuk aksi nyata dari pemerintah baik dari pusat hingga daerah dalam upaya pembangunan desa dan juga peningkatan dalam bidang penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa.

Adapun ruang lingkup dari program Pamsimas ini adalah :

1. Memberdayakan masyarakat serta mengembangkan kelembagaan lokal
2. Meningkatkan kesehatan juga perilaku higienis serta pelayanan sanitasi
3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum
4. Hibah Insentif untuk Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota
5. Dukungan pelaksanaan dan Manajemen Proyek

² Pokja Nasional “Latar Belakang POKJA AMPL NASIONAL” diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 20.15

Program penyediaan air minum, sanitasi, dan juga kesehatan ini secara efektif dan berkelanjutan dengan menggunakan konsep berbasis pada masyarakat tentunya melalui pelibatan dari seluruh elemen masyarakat yang ada dan dilaksanakan dengan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan dari masyarakat. Pendekatan yang satu ini dilaksanakan dengan secara bersama-sama menyediakan sarana serta kegiatan yang sekiranya masyarakat butuhkan, bersedia nantinya untuk dapat berkontribusi dan mengelola juga memeliharanya hingga nantinya akan terbentuk rasa memiliki terhadap kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan tersebut oleh sebab itu diperlukanlah sebuah usaha dalam hal pemberdayaan masyarakat yang nantinya diharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif baik dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara apa yang telah dibangun tersebut dan tak lupa untuk selalu melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di lingkungan masyarakat.

Kabupaten Semarang adalah salah satu lokasi Kabupaten yang ada di Jaa Tengah dimana telah mendapatkan bantuan program PAMSIMAS ini sejak tahun 2008 silam. Dimana penyebaran pelaksanaannya sudah mencakup dari hampir seluruh wilayah kecamatan yang terdapat didalamnya. Untuk memilih lokasi dalam program PAMSIMAS ini di Kabupaten Semarang dibutuhkan kriteria seperti berikut :³

1. Belum pernah mendapatkan Program PAMSIMAS sebelumnya
2. Cakupan dalam akses air minum yang aman masih rendah
3. Cakupan dalam akses sanitasi juga masih rendah

³ Memorandum Program PAMSIMAS II TH 2013-2015 District Cordinator Kabupaten Semarang

4. Tingkat penyakit diare (maupun penyakit lain yang ditularkan yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data yang ada di Puskesmas.
5. Dapat memenuhi biaya penerima manfaat
6. Ada pernyataan dari masyarakat untuk :
 - a. Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Air Minum dan Sanitasi sebanyak minimal 3 orang
 - b. Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM yang terdiri dari 4% in cash dan 16% in kind.
 - c. Menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan.

Konfirmasi akhir desa/kelurahan sasaran selanjutnya ditentukan oleh kriteria respon dan kesediaan masyarakat untuk berkontribusi sebesar minimal 20% .

Program ini dikatakan cukup berhasil dilihat dari pengelolaan yang telah dilakukan oleh para pelaku pamsimas di tingkat Desa, terbukti dengan terbentuknya Asosiasi Badan Pengelola Sarana (Asosiasi-SPAMS) dibawah bimbingan dari DPMU dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat .

Dalam indikator akses air minum yang layak , jika kita bandingkan dengan apaian yang telah dilakukan provinsi pada tahun 200 , tingkat capaian kerja pelayanan air minum Kabupaten Semarang relatif melampaui rata-rata provinsi. Pada indikator penyehatan lingkungan (sanitasi) , dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2010 status capaian provinsi pada tahun 2010, status capaian kerja pelayanan air minum Kabupaten Semarang relatif melampaui rata-rata provinsi.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Maksimal dalam pelayanan air minum dan sanitasi Provinsi dan *Millenium Development Goals* atau target tujuan pembangunan Milenium Indonesia maka kinerja air minum Kabupaten Semarang perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk sarana mata air terlindung. Demikian pula halnya dengan kinerja penyehatan lingkungan (sanitasi), perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk sarana sanitasi umum.

Selain cakupan layanan masyarakat yang sudah memiliki sarana sanitasi, indikator lain di bidang sanitasi adalah tingkatan dari rumah tangga yang telah menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang biasa disebut juga PHBS. Hal ini karena faktor yang sangat mempengaruhi derajat hidup manusia ialah salah satunya dari faktor perilaku tadi. Dengan menerapkan perilaku hidup yang sehat nantinya diharapkan dapat menurunkan angka penyakit yang ada.

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tahun 2010 adalah sebesar 58,25%. Angka tersebut diperoleh dari Rumah Tangga Sehat Utama dijumlahkan dengan Rumah Tangga Sehat Paripurna. Jika dibandingkan dengan target SPM masih berada dibawah target yaitu sekitar 65%.

Berdasarkan hasil analisis Tim Pokja AMPL Kabupaten Semarang Untuk target kinerja AMPL Kabupaten Semarang pada tahun 2015 adalah sebesar 89% pada air minum yang terdiri dari 91,91% untuk wilayah perkotaan dan 85,71% untuk wilayah pedesaan. Sedangkan untuk sanitasi sebesar 85,49% yang terdiri dari 88,54% untuk wilayah perkotaan dan 82,03% untuk wilayah pedesaan.

Berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka target AMPL tahun 2015 Kabupaten Semarang minimal adalah 62,53% untuk air minum dan 72% untuk sanitasi. Penetapan target ini telah dituangkan dalam Rencana Aski Daerah untuk mempercepat pencapaian dalam Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.

Analisis kebutuhan investasi bagi pelayanan AMPL di Kabupaten Semarang dilakukan berdasarkan kesenjangan antara kondisi eksisting tahun 2010 dengan target yang diharapkan tahun 2015. Penambahan akses air minum hingga tahun 2015 adalah sebesar 62.169 jiwa untuk wilayah perkotaan dan 80.798 wilayah untuk wilayah pedesaan. Perhitungan perkiraan investasi dalam pelayan AMPL dilakukan melalui dua tahapan pendekatan antara lain :

- a. Berbasis terhadap instansi/lembaga baik itu dinas, badan, perusahaan daerah maupun swasta dan lain-lain
- b. Berbasis masyarakat, dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan menjadi yang menentukan dalam pelaksanaan layanan, melalui proses yang mengutamakan pemberdayaan dan partisipasi yang aktif dari masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tingkat masyarakat dengan akses air yang layak di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2010 adalah 78% dan proporsi penduduk dengan akses sanitasi layak adalah 70,79%. Dibandingkan dengan perkotaan, kondisi di pedesaan relatif lebih rendah. Sesuai dengan komitmen pencapaian *Millenium Development Goals* maka pada akhir tahun 2015

diharapkan Kabupaten Semarang mampu mencapai kondisi 89% penduduk memiliki akses air minum layak dan 85,49% penduduk memiliki akses sanitasi layak. Dengan kata lain Kabupaten Semarang harus mampu menyediakan tambahan akses air minum bagi 142.967 jiwa penduduk dan tambahan akses sanitasi bagi 174.177 jiwa penduduk.

Untuk mencapai target AMPL tersebut, Kabupaten Semarang dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang akan ditangani sampai dengan tahun 2015, yaitu :

a. Aspek teknis :

1. Kapasitas sumber air baku saat ini hanya 2.034,26 liter/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan tahun 2015, diperlukan tambahan kapasitas sumber air baku sebesar 381,41 liter/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kesulitan sumber air baku, kapasitas bangunan pengambilan air baku dan jaringan pipa transmisi.
2. Kapasitas produksi saat ini hanya mencapai 1.394,92 liter/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2015, diperlukan tambahan kapasitas produksi sebesar 247,82 liter/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kesulitan teknologi pengolahan air minum, kapasitas instalasi pengolahan air.
3. Kapasitas distribusi saat ini hanya mencapai 968,70 liter/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2015, diperlukan tambahan kapasitas distribusi sebesar 172,10

liter/detik. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kapasitas reservoir distribusi, kesulitan pengembangan jaringan pipa distribusi, kinerja pompa distribusi, tingkat kehilangan air.

4. Kapasitas pelayanan saat ini hanya mencapai 728.292 jiwa. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2015, diperlukan tambahan kapasitas pelayanan sebesar 142.967 jiwa. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala yaitu kerusakan sarana air minum, keterbatasan pengelolaan sambungan rumah, sambungan non domestik, tingkat pemanfaatan kran umum serta peningkatan layanan akses air minum pedesaan.

b. Aspek sosial

1. Masyarakat masih kurang bisa memahami tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2. Di pedesaan air belum dipandang sebagai barang ekonomi, sehingga menyulitkan pengembangan sarana air minum dan sanitasi

c. Aspek lingkungan

1. Kualitas dan kuantitas dari sumber air baku yang menurun akibat kerusakan lingkungan
2. Tingginya pemanfaatan sumur bor yang dapat membahayakan lingkungan
3. Kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku

d. Aspek kelembagaan

1. Kurang maksimalnya koordinasi program dan kegiatan antar stakeholder bidang AMPL
2. Kinerja dari PDAM yang belum maksimal dalam pelayanan air bersih bagi masyarakat perkotaan.
3. Kesiapan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) di desa-desa sebagai penyedia layanan air minum dan sanitasi pedesaan.

e. Aspek pendanaan

1. Masih rendahnya alokasi APBD untuk bidang penyediaan layanan air minum dan sanitasi.
2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam pembiayaan bidang penyediaan layanan air minum dan sanitasi.
3. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.

Di Kabupaten Semarang total penduduk yang tercukupi dengan akses air minum yang layak sebesar 78% pada tahun 2010 dari total seluruh jumlah penduduk. Dengan jumlah 16,41 % penduduk yang dilayani air minum dengan jaringan perpipaan sedangkan yang dilayani oleh bukan jaringan perpipaan adalah 61,55%. Dalam upaya memenuhi kebutuhan air sampai dengan tahun 2015, maka isu strategis yang dipakai dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Semarang yang akan ditangani sampai dengan tahun 2015

adalah berikut ini :

a. Aspek Teknis

1. Jaringan Pipa

- a) Terpenuhinya kebutuhan dari air baku mencakup adanya tambahan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum.
- b) Pemenuhan kebutuhan unit produksi mencakup adanya peningkatan sarana dan prasarana produksi sehingga kebutuhan air baku tercukupi.
- c) Pemenuhan kebutuhan unit distribusi meliputi adanya peningkatan unit distribusi sehingga distribusi air kepada masyarakat dapat terlayani secara maksimal.
- d) Pemenuhan kebutuhan unit layanan mencakup adanya peningkatan unit pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.

2. Bukan Jaringan Pipa

Dalam sistem yang satu ini, isu yang dihadapi antara lain mencakup tentang tantangan teknis dalam memberi perubahan akses layanan jaringan yang bukan perpipaan belum terlindungi dijadikan sebagai layanan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi.

b. Aspek non teknis

Pada pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Semarang dihadapkan terhadap sejumlah isu yang berkaitan dengan hal-hal yang non teknis.

Isu strategis yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Lembaga yang melaksanakan pelayanan mencakup perluasan pelayanan air minum dengan pihak yang menyelenggarakan dari kelompok masyarakat atau lembaga seperti Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS).
2. Pengaturan mencakup adanya pengaturan mengenai pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum yang berbasis masyarakat.
3. Pembiayaan yang mencakup hal pembiayaan diharapkan tidak hanya berasal dari APBD akan tetapi juga berasal dari pihak swasta (*Corporate Social Responsibility*) dan juga termasuk bentuk dari masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sistem penyediaan air minum pedesaan yang berbasis pada masyarakat.

Pelaksanaan program PAMSIMAS II tahun 2013-2015 di Kabupaten Semarang secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan peraturan ada. Permasalahan selalu dimonitor setiap saat dan direkap pada laporan mingguan dan bulanan yang sekaligus tindak lanjut penyelesaian masalahnya. Permasalahan yang sering muncul pada pelaksanaan program/fisik tahun berjalan antara lain:⁴

- a. Ketelambatan turunnya SK Penetapan Desa Sasaran
- b. Keterlambatan terbitnya DIPA
- c. Keterlambatan penugasan Fasilitator Keberlanjutan dan Fasilitator Masyarakat
- d. Susahnya mencari sumber air baku terutama potensi air tanah

⁴ Ibid.

dalam (sumur bor)

- e. Terlalu lamanya proses pengeboran karena litologi batuan dan *water loss*
- f. Belum terbiasanya melaksanakan program dan kesibukan di luar program KKM dan Satlak.
- g. Adanya peraturan dan hibah KKM/lembaga harus tercatat di Kemenkumham
- h. Keterlambatan proses pengadaan barang, dan keterlambatan pengiriman barang

Permasalahan yang sering muncul pada pasca program/keberlanjutan antara lain:

- a. Satu sistem tidak berfungsi dari dua/beberapa sistem yang ada
- b. Mengecilnya debit air
- c. Pengurus kurang aktif / sudah pergi/ pindah/ meninggal
- d. Pergantian pengurus BPSPAMS
- e. Iuran terlampaui rendah sehingga tidak ada saldo kas
- f. Iuran tidak berjalan
- g. Pompa rusak dan BPSPAMS belum mempunyai saldo cukup

Semenjak program PAMSIMAS dilaksanakan di Kabupaten Semarang dari PAMSIMAS I (2008-2012) hingga program PAMSIMAS II (2013-2015) sudah terbangun sebanyak 93 sarana PAMSIMAS dari keseluruhan jumlah 208 desa terdapat di wilayah Kabupaten Semarang. Namun hingga tahun 2015,

terdapat 1 desa tidak berfungsi dan 6 desa sebagian berfungsi dari total seluruh desa yang sudah terdapat sarana program PAMSIMAS di Kabupaten Semarang.

Desa tersebut antara lain :⁵

1. Tidak berfungsi : Desa Timpik Kecamatan Susukan

2. Sebagian Berfungsi :
 - a. Desa Karangdusun Kecamatan Tengaran
 - b. Desa Kemitir Kecamatan Sumowono
 - c. Desa Gebugan Kecamatan Bergas
 - d. Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus
 - e. Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus
 - f. Desa Jubelan Kecamatan Sumowono

Keterangan yang didapat tentang tidak berfungsinya program PAMSIMAS di Desa Timpik yaitu program yang dilaksanakan termasuk dalam PAMSIMAS II karena mulai dibangun pada tahun 2014. Dibangun sumur bor untuk penyediaan layanan air minum serta sanitasi dasar dengan berbasis masyarakat di Desa Timpik, kegiatan tersebut sudah berjalan selama 6 bulan namun kemudian tidak berfungsi karena penurunan debit air. Kemudian dilakukan upaya untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan proses pengeboran yang lebih dalam untuk sumur bor sebagai sumber air baku yang sudah dibuat tapi upaya tersebut gagal karena factor alam yang ternyata tidak memungkinkan untuk mendalami lagi sumur bor. Selain itu factor lain adalah tentang tidak adanya iuran yang

⁵ Ibid.

menyebabkan tidak berfungsinya PAMSIMAS. Jadi pemakaian program PAMSIMAS di Desa Timpik hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja yang dianggap penting/*urgent* seperti contohnya dipakai untuk mencukupi kebutuhan air warga yang sedang menyelenggarakan hajatan dan iuran pun nantinya akan dibayar oleh warga yang menggunakan air tersebut setelah acara hajatannya sudah selesai. Selain itu ada masalah pula dalam pelaksanaan program PAMSIMAS II ini di Desa Timpik Antara seperti masalah tentang pengelolannya dari pihak Desa itu sendiri.⁶

Oleh karena itu dengan melihat dari penjabaran tentang bagaimana latar belakang masalah yang ada, maka penulis disini mengambil keputusan untuk mengambil judul “**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT II KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS DESA TIMPIK KECAMATAN SUSUKAN)**”

1.2. Perumusan Masalah

Dari fenomena/masalah yang terjadi serta dari uraian tentang latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis akan merumuskan masalah seperti berikut ini :

1. Bagaimanakah Implementasi serta pemberdayaan masyarakat dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II yang terlaksana di Desa Timpik Kecamatan Susukan ?

⁶ Wawancara dengan Bapak Nur Tri Wayan selaku Ketua Asosiasi SPAMS Pedesaan Kabupaten Semarang di Dispermasdes tanggal 28 Februari 2017

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Teoritis

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi dalam pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Timpik Kecamatan Susukan.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemberdayaan masyarakat diterapkan dalam pelaksanaan PAMSIMAS di Desa Timpik Kecamatan Susukan.
- c. Untuk mengetahui apa saja hal yang dapat memberikan pengaruh dalam implementasi program PAMSIMAS di Desa Timpik Kecamatan Susukan baik sebagai faktor penghambat ataupun faktor pendukung.

1.3.2. Tujuan Praktis

- a. Penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini untuk memberikan khasanah keilmuan tentang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat yang ada di Desa Timpik Kecamatan Susukan.
- b. Penelitian kali ini memiliki tujuan untuk melihat keberlanjutan serta faktor apa saja yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Timpik Kecamatan Susukan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, antara lain manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1.4.1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi mahasiswa adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat menyelesaikan Program Strata I (satu) pada Departemen politik dan pemerintahan akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- b. Manfaat praktis bagi perguruan tinggi adalah menambah kajian tentang Implementasi Program PAMSIMAS di Kabupaten Semarang.
- c. Manfaat praktis bagi masyarakat umum adalah agar masyarakat mengetahui tentang bagaimana implementasi dalam program PAMSIMAS di Kabupaten Semarang.

1.4.2. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu untuk menambah wacana tentang Analisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Semarang

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Menurut Sumadi Suryabrata (1990) dalam sebuah proses penelitian diperlukan untuk mencari teori, konsep, serta generalisasi hasil penelitian yang bisa dijadikan untuk landasan teori dalam pelaksanaan penelitian.⁷ Landasan teori ini diperlukan agar nantinya penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan hanya menjadi bahan untuk coba-coba saja. Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Kerlinger (1978) mendefinisikan teori sebagai berikut.

“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with purpose of explaining and predicting the phenomena”.

“Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”.⁸

Dari beberapa definisi yang sudah dikemukakan. Karena hal tersebut, teori menjadi aspek yang vital dalam melakukan penelitian agar penelitian yang dilakukan memiliki konsep yang sistematis. Konsep yang sistematis maksudnya konsep yang disusun dengan mengikuti alur yang teratur dan logis. Teori tersebut harus bisa diuji tentang kebenarannya, kalau tidak terbukti maka itu bukanlah sebuah teori.

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. cetakan kedua. 2008 hal.52

⁸ Ibid.

Marx (1963) membedakan tentang adanya tiga macam teori yang saling berhubungan dengan data empiris diantaranya :⁹

1. Teori dedukti yaitu memberi sebuah keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulasi ke arah data yang diterangkan. Teori menunjukpada sekelompok hukum yang secara logis tersusun. Hukum disini bersifat yang deduktif yakni suatu hukum menunjuk suatu hubungan antara variabel empiris yang memiliki sifat tetap dan sebelumnya dapat diramalkan.
2. Teri Induktif merupakan sebuah cara menerangka dari data ke teori. Teori dijadikan sebuah rangkuman tertulis tentang suatu kelompok yang diperoleh seara empiris didalam bidang tertentu. Dari data yang diperoleh ini muncul konsep yang teoritis.
3. Teori fungsional dimana tampak adanya sebuah interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis yaitu data yang mempengaruhi pembentukan teori dan membentuk kembali pengaruh data itu. Teri ini memiliki sifat menggeneralisasi. Hal ini biasanya ditunjukkan adanya hubungan fungsional antara data dan pendapat yang teoritis.

Jenis-jenis teori di atas memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, dalam pemilihan jenis teori yang digunakan yaitu teori deduktif. Pada penelitian kali ini, penulis menhgunakan teori deduktif. Penggunaan teori deduktif ini dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu karena teori ini lebih mengutamakan penggunaan logika dalam menarik satu atau

⁹ Ibid.

lebih kesimpulan dari premis yang telah diberikan. Teori ini lebih digambarkan sebagai suatu langkah pengambilan keputusan dari sesuatu yang bersifat umum ke suatu yang bersifat khusus.

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa teori atau temuan melalui hasil dari berbagai penelitian yang ada sebelumnya dirasa sangat perlu dan juga bisa dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian. Suatu data pendukung yang peneliti rasa perlu dijadikan bagian tersendiri yaitu penelitian terdahulu yang tentunya harus relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini, fokus terhadap penelitian terdahulu yang menjadi acuan adalah terkait dengan adanya implementasi sebuah program ataupun kebijakan publik serta pembangunan berbasis masyarakat/pembangunan berbasis masyarakat. Karena hal tersebut, disini peneliti melakukan kajian beberapa hasil penelitian yang ada.

Pertama, penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lebak” oleh Rachmawati Dwi Maharani Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program PAMSIMAS di Kabupaten Lebak dengan menjadikan Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung dan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak sebagai studi kasusnya. Berdasarkan dari latar belakang yang memuat beberapa permasalahan diantaranya kurangnya keterlibatan langsung masyarakat di Desa Pasir Tanjung dan kurang koordinasi pihak pengelolaan Pamsimas, penempatan tempat penampungan yang kurang strategis, serta kurangnya kesadaran

masyarakat akan kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deduktif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta studi di lapangan dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Teknik dalam penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 10 orang teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interkatif dari Milles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori implementasi Kebijakan dari Charles O. Jones yang didalamnya terdapat aspek-aspek kegiatan implementasi program yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi sebagai pedomanpeneliti dalam melakukan penelitian.Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi program Pamsimas dapat dinilai belum cukup efektif mencapai tujuan formalnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar program ini dapat mencapai tujuannya dengan baik adalah penetapan sasaran lokasi yang akan dijadikan untuk tempat penampungan yang sekiranya tidak merugikan pihak manapun, penetapan sasaran program yang tepat dan konsisten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, serta pelaksanaan pengawasan yang tepat dan rutin untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan program di lapangan.¹⁰

¹⁰Maharani,Rahmawati Dwi. (2014). Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan SanitasiBerkbasis Masyarakat di Kabupaten Lebak. Tangerang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada [http://repository.fisip-untirta.ac.id%2F375%2F1%2FANE%2520-%2520IMPLEMENTASI%2520program%2520PENYEDIAAN%2520AIR%2520MINUM%2520DAN%2520SANITASI.pdf&usg=AOvVaw3Ifh\)6aof63PSSbXe1sHftp](http://repository.fisip-untirta.ac.id%2F375%2F1%2FANE%2520-%2520IMPLEMENTASI%2520program%2520PENYEDIAAN%2520AIR%2520MINUM%2520DAN%2520SANITASI.pdf&usg=AOvVaw3Ifh)6aof63PSSbXe1sHftp) diunduh tanggal 20 Januari 2017, pukul 15.20

Kedua, penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Program penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Sumedang” oleh Vina Eka Yuliawati dari Universitas Padjajaran. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi program PAMSIMAS di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Berdasarkan latar belakang yang memuat beberapa permasalahannya diantaranya kurangnya koordinasi antara unit-unit terkait dan juga kurang optimalnya proses sosialisasi dan partisipasi dari masyarakat, sehingga maksud dan tujuan dari program tersebut belum tersampaikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deduktif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpul informan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Peneliti menggunakan teori implementasi dari Charles O Jones yang didalamnya terdapat aspek-aspek kegiatan implementasi program yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi sebagai pedoman peneliti dalam melakukan penelitian. Maka dapat disimpulkan jika secara umum implementasi Program PAMSIMAS dapat dinilai belum cukup efektif mencapai tujuan formalnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar

program ini dapat mencapai tujuannya dengan baik adalah penetapan sasaran program yang tepat dan konsisten dilaksanakan sesuai ketentuan, pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh pihak pelaksana di desa dan pelaksanaan pengawasan yang tepat dan rutin untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan program di lapangan.¹¹

Kemudian yang ketiga penelitian terdahulu dari Barkah Welli Sanjaya dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) tahun 2009-2010 di Kabupaten Grobogan. Program Pamsimas merupakan program pemerintah pusat yang membantu penyediaan air minum dan sanitasi dengan konsep berbasis kebutuhan masyarakat bagi kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan akses air dan sanitasi. Salah satu kabupaten yang telah melaksanakan program Pamsimas tahun 2008 adalah Kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah pada proses pelaksanaan Pamsimas yakni pada komponen pendukung keberhasilan program Pamsimas seperti perencanaan (Komponen I : Keterlibatan Masyarakat) Pembangunan (Komponen II : Pelayanan sanitasi dan kesehatan Masyarakat) dan pengelolaannya (Komponen III : penyediaan sarana air minum dan sanitasi). Proses perencanaan tidak selamanya berbasis masyarakat didalam perencanaan program, karena yang terlibat adalah perwakilan masyarakat dan pemerintah desa dan hasil perencanaan tidak disampaikan kepada masyarakat

¹¹ Yuliawati, Vina Eka. (2016). Skripsi : Implementasi Program penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Sumedang. Universitas Padjajaran Pada <http://repository.unpad.ac.id/328/> . diunduh tanggal 22 Januari 2017, pukul 10.00

luas. Sehingga masyarakat hanya mengetahui perencanaan program dari komponen kontribusi biaya dan tenaga untuk pembangunan program Pamsimas tanpa mengerti perincian pembangunan Program Pamsimas. Di sisi lain, Desa Jetaksari memiliki permasalahan pada pembangunan yang berdampak pada pelaksanaan pengelolaan yakni masalah pada proses penentuan sumber air yang tidak melalui uji kelayakan dan kesehatan sehingga air yang dihasilkan tidak layak konsumsi oleh masyarakat, yang pada akhirnya membuat sarana tidak pernah dipakai serta dirawat oleh masyarakat. Desa Kenteng, Ngrandah, dan Pakis memiliki masalah pada upaya penambahan jumlah sumur untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih, meskipun telah dilakukan pengembangan akses sarana air.

Namun penggunaan sarana air pribadi daripada sumur pamsimas ketika musim penghujan, sedangkan penggunaan sarana Pamsimas hanya ketika musim kemarau saja. Padahal, program Pamsimas mengharapkan adanya keberlanjutan penggunaan untuk membantu pemasukan biaya untuk pengelolaan sarana air. Sedangkan dari sisi kegiatan pengelolaan sanitasi, hanya desa Kenteng yang memiliki kegiatan rutin untuk melaksanakan pemantauan tingkat kesadaran sanitasi dan PHBS masyarakat, sedangkan desa Jetaksari, Ngrandah, dan Desa Pakis memiliki masalah-masalah koordinasi dan bantuan serta pemahaman mengenai konsep relawan antar anggota kader sanitasi maupun pemerintah. Sehingga membuat pelaksanaan kegiatan pemantauan sanitasi dan PHBS masyarakat terkendala, meskipun memiliki potensi untuk dilanjutkan kembali.¹²

¹²Sanjaya, Barkah Welli. (2012). Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Pamsimas (Penyediaan

Yang keempat adalah penelitian Uswatun Ayu Sekarini dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)” dalam penyusunannya skripsi ini berkenaan dengan adanya PNPM-MP dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana Implementasi PNPM-MP dan apa faktor yang menunjang serta menghambat yang dialami oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai implementasi PNPM-MP serta kinerja BKM dalam pelaksanaan PNPM-MP.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi PNPM-MP di kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta sudah sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai juga dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Penerapan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan lancar, meskipun tetap ada kendala yang dihadapi oleh BKM dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya pemahaman anggota BKM tentang PNPM-MP dan jumlah fasilitator yang kurang seimbang dengan banyaknya kelurahan di Kecamatan Umbulharjo, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam

berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.¹³

Penelitian selanjutnya oleh Novayanti Sophia Rukmana Universitas Hasanudin dengan judul Implementasi program jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enkerang. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kegiatan pelaksanaan program kesehatan gratis di Puskesmas Sumbang ada beberapa kondisi faktual yang dapat ditemui dilapangan yakni belum sepenuhnya masyarakat mengetahui adanya program dan prosedur kesehatan gratis yang bergulir di masyarakat dengan kata lain jika tidak disosialisasikan dengan luas maka tujuan dari program ini dapat sesegera mungkin di capai. Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menciptakan pola hidup sehat disamping kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh pegawai setempat Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program jaminan kesehatan gratis daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi implementasinya. Dari hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi program jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Enrekang belum maksimal dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.

¹³Sekarini, Uswatun Ayu.(2013). Skripsi :Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Pada <http://digilib.uin-suka.ac.id/11337/> diunduh tanggal 22 Januari 2017 pukul 17.00

Implementasi Program Kesehatan Gratis belum optimal. Hal ini terutama terlihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, setelah melakukan penelitian bahwa, tujuan dari program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah sudah tercapai namun dalam hal pencapaiannya belum terlalu maksimal sehingga perlu adanya usaha peningkatan yang dilakukan. Sumberdaya, bahwa sumberdaya sudah cukup baik namun, dalam hal ini Sumberdaya manusia yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Karakteristik agen pelaksana, yaitu agar Kartu Jamkesda segera dibagikan kepada seluruh masyarakat yang mendapatkan program jamkesda secara merata.¹⁴

1.5.2. Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan berbasis masyarakat ini secara sederhana bisa kita artikan sebagai sebuah pembangunan yang lebih mengau pada kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta direnanakan dan juga dilaksanakan oleh masyarakat dengan ara memanfaatkan potensi darin sumber daya yang ada dan sebaiknya dapat diakses oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, pembangunan yang berbasis masyarakat hasruslah berasal dari kebutuhan yang memang masyarakat alami juga bukan pembangunan yang dirumuskan oleh pihak lain diluar masyarakat yang merasa lebih tahu dan lebih pandai dalam merumuskan sebuah pembangunan yang cocok bagi masyarakat .¹⁵ Dalam penjelasan diatas terdapat aspek-aspek yang tentunya menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang

¹⁴Rukmana, Novayanti Sopia. (2013). Skripsi : Implementasi program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enkerang. Universitas Hassanudin pada repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3915 tanggal 22 Januari pukul 19.00

¹⁵Theresia, dkk. Pembangunan Berbasis Masyarakat : Acuan Bagi Praktisi Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. 2015. Hal.28

pembangunan yang berbasis terhadap sumber daya lokal yang ada, dimana dalam analisis implementasi program PAMSIMAS ini implementor tingkat paling baah itu berasal dari msasyarakat Desa Timpik itu sendiri yang nantinya mereka akan bergerak sebagai pengelola juga pengurus pada prgram tersebut.

Pembangunan yang berbasis pada masyarakat ini, sering pula diartikan dengan pembangunan dari bawah sebagai yang lebih baik dibanding pembangunan dari atas. Tapi secara empiris, suatu pembangunan yang direnakan seperti apa yang dikembangkan dikembangkan oleh Khan (Scramm dan Learner, 1976) di Banglades ternyata juga dapat membuahkan hasil yang baik. Mengenai hal tersebut, yang menjadi perdebatan di antara pembangunan yang dimulai dari atas dan pembangunan yang mulai dari bawah sudah berlangsung sejak lama.

Pembangunan yang berawal dari atas ini memberikan tempat kepada pemerintah pusat dan atau elit masyarakat sebagai pencetus gagasan, dengan asumsi mereka tahu yang terbaik untuk masyarakatnya, tanpa mendengar atau meadahi aspirasi dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan ataupun digerakkan dengan jalan memberikan insentif ataupun juga memberi rasa takut. Sebaliknya jika pembeanguna yang dimulai dari bawah ini lebih memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berkontribusi mulai dari perencanaan, dengan asumsi bahwa masyaraka dapat mengidentifikasi masalah, kebutuhan, serta cara-cara terbaik yang cocok dengan kondisi mereka.¹⁶

¹⁶ Ibid.

1.5.3. Teori Implementasi

1.5.3.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Edward III dan Sharkansky dalam Islamy adalah:

What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs.

Kebijakan publik yaitu apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan adalah rangkaian dari tujuan dan sasaran program yang dimiliki pemerintah.¹⁷

Selain itu menurut Carl Friedrich dalam Dwiyanto, mendefinisikan kebijakan merupakan sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan yang merupakan usulan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkup tertentu sehubungan dengan adanya hambatan sekaligus mencari peluang yang ada untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.¹⁸

Menurut James Anderson dalam Winarno, kebijakan publik merupakan arah dari sebuah tindakan yang memiliki maksud yang ditentukan sebelumnya oleh aktor atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah.¹⁹

Anderson membagi langkah-langkah atau fase yang harus dijalani dalam sebuah proses kebijakan publik menjadi lima tahapan yaitu:

- a) *Agenda setting*
- b) *Policy Formulation*

¹⁷M. Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Peramusn kebijaksanaan Negara*. 1984. Hal.18

¹⁸Dwiyanto Indiahono. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. 2009. Hal.18

¹⁹Budi Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. 2008. Hal.18

- c) *Policy adoption*
- d) *Policy implementation*
- e) *Policy evaluation*

Disini peneliti berfokus pada salah satu tahapan penting yaitu *policy implementation*. Dimana pada tahap *policy implementation* berisi tentang bagaimana alternatif dalam pemecahan sebuah masalah yang sebelumnya sudah disepakati itu dilaksanakan. Pada tahap ini suatu kebijakan sering menghadapi berbagai kendala. Rumusan yang sebelumnya sudah ditetapkan secara matang dan terencana kemungkinan berbeda ketika sudah ada di lapangan. Hal ini karena adanya faktor yang sering mempengaruhi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak langsung berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala apa saja yang dapat menjadi penghambat harus segera diatasi secepatnya.

1.5.3.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam tahapan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat seberapa jauh program pemerintah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan maksud dan tujuan awal apakah masih ada berbagai permasalahan atau penghambat dalam penerapan atau pencapaian kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi implementasi merupakan kegiatan untuk melihat sejauh mana kebijakan dilaksanakan sesuai dengan sasaran awal sebagai upaya awal penyelesaian masalah di lingkungan sasaran tersebut.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Lester dan Stewart, Implementasi kebijakan ini dapat dilihat dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah ditetapkan nya undang-undang. Implementasi dipandang secara luas memiliki makna dalam pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan dari kebijakan atau program.²⁰ Menurut Ripley dan Franklin implementasi merupakan apa yang terjadi setelah ditetapkan nya undang-undang yang memberi otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis output yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tentang tindakan apa saja yang telah dilakukan berbagai aktor khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.²¹

Secara ontologis, subject matter studi implementasi dimaksudkan untuk dapat memahami fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, sebagai contohnya mengapa suatu kebijakan publik tidak berhasil untuk diimplementasikan pada suatu daerah, mengapa kebijakan publik yang sama, yang juga telah dirumuskan oleh pemerintah memiliki perbedaan dalam keberhasilan ketika dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mengapa suatu jenis kebijakan berhasil dengan mudah dibandingkan dengan jenis kebijakan yang lain, mengapa perbedaan kelompok sasaran mempengaruhi dalam berhasil atau

²⁰ Budi Winarno. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. 2012. Hal.147

²¹ Ibid.

tidaknya implementasi suatu kebijakan. Tindakan guna memahami berbagai fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor apa saja yang bisa menimbulkan munculnya berbagai fenomena tersebut.²²

Sabatier menyebut setelah mereview berbagai penelitian implementasi, terdapat enam variabel utama yang diyakini dapat memberikan kontribusi dalam terciptanya keberhasilan atau kegagalan implementasi. Variabel yang dimaksud adalah:²³

- a. Tujuan dari kebijakan yang jelas
- b. Merumuskan kebijakan dengan menggunakan teori yang kuat
- c. Adanya dasar hukum yang kuat dan jelas dalam proses implementasi
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan
- e. Dukungan dari stakeholder
- f. Stabilitas kondisi sosial, politik, ekonomi.

1.5.3.3. Model Implementasi

Secara umum, berdasarkan para peneliti Generasi II memahami dan memberikan penjelasan tentang permasalahan implementasi, dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.²⁴

²² Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. Implementasi Kebijakan Publik :Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. 2012. Hal.18

²³Ibid.

²⁴ Ibid. hal.37-44

a. Pendekatan *Top-Down*

Pendekatan yang bersifat *top-down* dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti dari Generasi II yang memakai logika berfikir dari atas selanjutnya melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Menggunakan Bahasa Sabatier (1986), pendekatan *top-down* dilakukan oleh para peneliti dengan langkah seperti ini : “*they started with policy decision (usually statute) and examined the extent to which is legally-mandated objectives were achieved overtime and why*”. Pendekatan yang satu ini juga sering disebut sebagai *policy-centered* karena fokus peneliti ini hanya tertuju pada kebijakan dan usaha untuk memperoleh fakta apakah jika kebijakan ketika diimplementasikan nantinya akan berhasil atau tidak.

Seara umum, tahapan kerja dari peneliti Generasi II jika menggunakan pendekatan *top-down* biasanya sebagai berikut ini :²⁵

1. Memilih kebijakan apa yang akan dikaji nantinya.
2. Mempelajari terlebih dahulu dokumen kebijakan yang ada agar dapat melakukan identifikasi sasaran serta tujuam kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan.
3. Melakukan identifikasi dari segala bentuk output kebijakan yang nantinya dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.
4. Identifikasi sudahkah output dari kebijakan diterima oleh kelompok

²⁵ Ibid.

sasaran dengan baik.

5. Identifikasi tentang output dari kebijakan itu apakah memberikan manfaat bagi kelompok sasaran atau tidak.
6. Identifikasi adakah dampak yang muncul setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima. Analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

Dengan langkah kerja yang telah digambarkan seperti di atas, maka penelitian yang bersifat *top-down* justru lebih tepat apabila digunakan untuk memberi nilai tentang efektifitas implementasi dari kebijakan, yaitu untuk memastikan apakah tujuan dari kebijakan yang telah diterapkan dapat tercapai di lapangan atau tidak.

b. Pendekatan *Bottom-Up*

Meskipun hasil pekerjaan dari peneliti Generasi II yang memakai pendekatan *top-down* telah memberikan banyak kontribusi terhadap upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan, akan tetapi beberapa peneliti Generasi II merasa tidak puas dengan pendekatan *top-down* yang dianggap terlalu menyederhanakan masalah dan cenderung instrumentalis karena hanya menaruh perhatian terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Padahal menurut para pengkritik pendekatan *top-down* ini, realitas dari implementasi kebijakan bisa jadi lebih kompleks dan tidak hanya fokus terhadap isu efektifitas atau efisiensi dari implementasi suatu kebijakan saja.

Karena ketidakpuasan mereka, beberapa peneliti Generasi II kemudian mengembangkan pendekatan yang kemudian mereka sebut sebagai *bottom-up*. Kali ini pendekatan dipelopori oleh Elmore (1978,1979), Lipsky (1971), Berman (1978), dan Hjern, Hanf, serta porter (1978). Pengikut dari pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting pada implementasi kebijakan ini , yaitu tentang pentingnya birokrat level bawah dan kelompok sasaran kebijakan. Argumen yang dijadikan dasar tentang pentingnya memperhatikan peran dari *street level bureaucrat* sangat berkaitan dengan posisi mereka dalam pelaksanaan kegiatan untuk dapat merealisasikan output kebijakan (jika keluaran kebijakan berupa pelayanan) atau menyampaikan output kebijakan tersebut kepada kelompok sasaran (jika keluaran kebijakan berupa hibah, bantuan, subsidi, dan lain-lain). Dengan perannya yang demikian maka *street level bureaucrat* menempati posisi penting yang nantinya akan sangat menentukan keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan. Disamping *street level bureaucrat* , menurut para pendukung pendekatan *bottom-up* implementasi juga dapat berhasil jika kelompok sasaran diberi kesempatan untuk terlibat sejak awal dari proses perencanaan kebijakan sampai implementasinya. Hal inilah yang sering dilupakan oleh pengikut pendekatan *top-down*.²⁶

Setelah menunjukan berbagai kelemahan dari pendekatan *top-down* maka para peneliti *bottom-up* menganjurkan untuk menggunakan pendekatan *bottom-up* yang dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memetakan stakeholder (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam

²⁶ Ibid.

implementasi kebijakan pada level terbawah.

2. Mencari informasi dari para aktor tersebut seberapa paham mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa saja kepentingan mereka terlibat dalam implementasi.
3. Memetakan keterkaitan para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level di atasnya
4. Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama
5. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi.

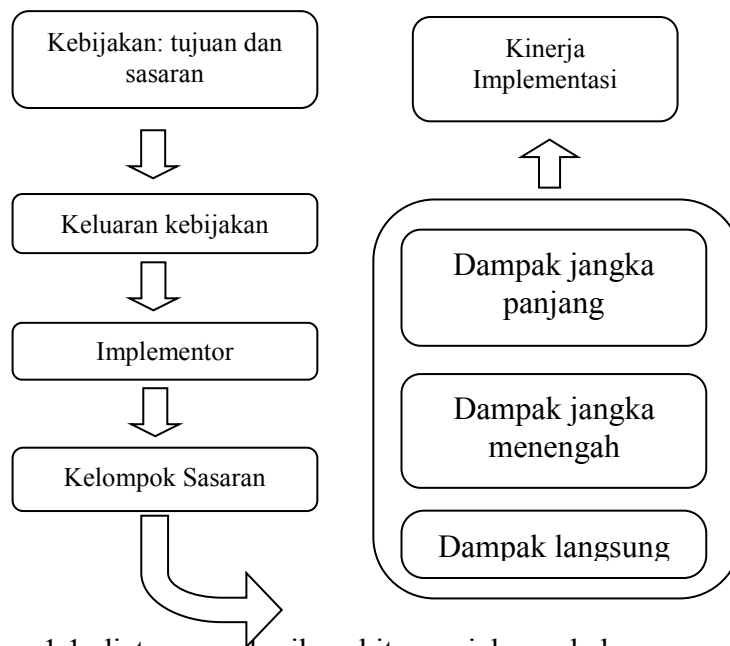
Dengan pola penelitian sebagaimana digambarkan tersebut, tujuan dari penelitian dengan pendekatan *bottom-up* ini adalah untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level tersebut dan mengetahui tentang apa motif ekonomi-politik dari aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Tentang hal ini Schofield mengatakan “bottom-up approach tend to focus more closely on policy network, often in multi-agency settings”. Pemetaan jaringan implementasi dan motif ekonomi-politik ini akan menjadi factor penting untuk menjelaskan sebab-musabab kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan.²⁷

Implementasi program merupakan suatu aktivitas yang biasanya sudah dilakukan oleh pejabat Pemerintah atau individu yang mengarah pada tercapainya suatu tujuan pada suatu kebijakan dan akan dinilai tingkat keberhasilannya.

²⁷ Ibid.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan implementasi *bottom-up*.

Bagan 1.1
Proses Implementasi



Gambar 1.1 diatas memberikan kita penjelasan bahwa proses implementasi itu beraal dari adanya suatu kebijakan. Pada dasarnya suatu kebijakan itu diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk dapat menapai tujuan yang diinginkan tersebut makan kebijakan membutuhkan (*policy input*)²⁸.

²⁸Ibid. hlm.72

Secara hipotetikal, hasil penelitian implementasi program PAMSIMAS yang ada di Desa Timpik yang menggunakan pendekatan *bottom-up* adalah sebagai berikut²⁹:

1. Para aktor paling bawah (*street level bureaucrat*) yang terlibat dalam implementasi akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang tujuan dan maksud implementasi suatu kebijakan dibanding dengan para aktor pada *level* yang lebih tinggi;
2. Perbedaan penafsiran tentang tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks (lingkungan sosial, ekonomi, dan politik) di mana implementasi tersebut dilakukan;
3. Kepentingan-kepentingan ekonomi-politik para aktor terbawah akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka menafsirkan tujuan-tujuan kebijakan;
4. Interaksi yang intensif antara aktor terbawah dengan kelompok sasaran, termasuk sanksi sosial yang akan mereka terima apabila menolak kehendak masyarakat, akan membuat *street level bureaucrat* mengakomodasi tuntutan-tuntutan mereka daripada mematuhi SOP yang dibuat oleh para *policy maker* pada level yang lebih tinggi;
5. Para aktor yang menduduki posisi lebih tinggi (kepala desa, camat, dan bupati) akan cenderung menafsirkan tujuan dari maksud kebijakan secara formal. Hal ini karena keberhasilan implementasi sesuai dengan apa yang tertulis dalam dokumen kebijakan akan

²⁹*Ibid* hlm.46

mempengaruhi penilaian kinerja mereka, citra, dan akan berimplikasi pada promosi untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model pendekatan *bottom-up* karena penulis rasa pendekatan inilah yang cocok untuk digunakan dalam penelitian yang nantinya penulis akan memetakan stakeholfer dari *street level bureaucrat* dimana dalam penelitian ini dimulai dari tingkatan desa selaku sasaran dimana program PAMSIMAS II ini dilaksanakan.

Tabel 1.1
Perbandingan Pendekatan *Top-down* dan *Bottom-up*

	<i>Top-down</i>	<i>Bottom-up</i>
Fokus awal	Kebijakan dari pemerintah pusat	Jaringan implementasi yang berada di level paling bawah
Identifikasi Aktor Utama yang Terlibat dalam Proses	Dari pusat (atas) dilanjutkan ke bawah sebagai konsekuensi implementasi	Dari bawah, dimulai dari implementasi pada level lokal ke pihak atas
Kriteria Evaluasi	Lebih berfokus terhadap pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan.	Apa saja yang dianggap penting oleh peneliti dan punya relevansi dengan kebijakan
Fokus Secara Keseluruhan	Bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan.	Interaksi strategis antar berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi

Sumber : Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti (2012 : 48)

1.6. Definisi Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono adalah seperti berikut ini, implementasi kebijakan merupakan satu tahapan penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah diencanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.³⁰

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri atas tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang bersifat dinamis, dimana implementor melakukan suatu aktivitas, sehingga nantinya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

³⁰ Dwiyanto Indiahono. Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis. 2009. hlm.143

2. Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Implementasi Kebijakan Program PAMSIMAS adalah sebuah penelitian terhadap pelaksanaan sebuah kegiatan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi yang baik bagi masyarakat khususnya di desa dan pinggiran kota melalui pembangunan berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dimana program ini pada level paling bawah pengelolaannya diserahkan pada masyarakat itu sendiri guna mencapai kesejahteraan bagi mereka.

1.7. Definisi Operasional

Pada penelitian satu ini ada beberapa dasar yang nantinya akan digunakan untuk memudahkan pembahasan penelitian yang akan dilakukan sehingga didapatkan hasil yang baik. Dasar-dasar dalam Analisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) II Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Timpik Kecamatan Susukan) sebagai berikut :

- A. Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Desa Timpik Kecamatan susukan
- Tujuan dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
 - Kemampuan tujuan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada
 - Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

A. Pemberdayaan masyarakat (pembangunan berbasis masyarakat) dalam program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Timpik Kecamatan Susukan

- Efektifitas dari pemberdayaan masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
- Efisiensi dari pemberdayaan masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
- Manfaat Pemberdayaan Masyarakat (pembangunan berbasis masyarakat) di dalam Program Penyediaan Air Minu dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
- Responsivitas terhadap pemberdayaan masyarakat dalam program
- Hambatan dalam pemberdayaan masyarakat (pembangunan berbasis masyarakat)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Terdapat tiga metodologi penelitian yang ada yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran kuantitatif dengan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi dalam Implementasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) II Kabupaten Semarang. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami makna dimana sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³¹ Selanjutnya, Noor menjelaskan penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.³²

Suatu penelitian yang baik yaitu jika menggunakan metodologi dalam penelitian yang memiliki syarat harus sistematis, terencana, serta mengikuti konsep ilmiah. Menurut Spradley, penelitian dengan metodologi kualitatif dinamakan sebagai situasi sosial yang memiliki tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.³³ Metode kualitatif ini merupakan penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden. Tipe penelitian deskriptif menggambarkan dan

³¹John W Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. 2010. Hlm.4

³²Any, Noor. *Managament Event*. 2009. Hlm.34

³³Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2007. Hlm.215

melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang non-hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Dan agar penelitian lebih terfokus pada sejauh mana suatu program dilaksanakan dan berhasil atau gagalkah suatu kebijakan/program tersebut dalam mencapai tujuannya oleh karena itu penulis lebih berfokus kepada jenis penelitian implementatif.

1.8.2. Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, perlu dikemukakan tempat di mana fenomena tersebut akan diteliti. Maka sesuai dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) II Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Timpik Kecamatan Susukan)” penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Semarang. Dengan berfokus pada instansi-instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti penulis diantaranya:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Semarang
2. Serta di Desa Timpik Kecamatan Susukan itu sendiri

1.8.3. Teknik Pemilihan Sampling

Menurut W. Gulo, populasi adalah sekumpulan obyek yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Obyek tersebut disebut satuan analisis. Satuan analisis ini mengandung perilaku atau karakteristik yang diteliti. Keseluruhan satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian disebut populasi.³⁴ Di dalam melakukan penelitian, populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah aparatur pemerintah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, serta masyarakat Desa Timpik yang juga berperan sebagai pihak pengelola. Obyek dalam penelitian ini dipilih atas dasar keyakinan penulis akan pengetahuan dan pemahaman yang memadai dari mereka atas permasalahan penelitian yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah tehnik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja.

³⁴W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. 2002. Hlm.76

1.8.4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian “Analisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) II Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Timpik Kecamatan Susukan)” penulis telah memilih individu maupun kelompok yang dianggap dapat membantu penulis dengan menceritakan apa yang mereka ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa saja yang berkaitan dengan fenomena di atas. Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain :

- a. Ketua Asosiasi SPAMS Pedesaan Kabupaten Semarang
- b. Kepala Sub Bidang SDA & TTG Bidang Pengembangan Desa SDA & TTG Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang
- c. Kepala Desa Timpik
- d. Ketua BP-SPAMS Desa Timpik
- e. Kelompok Keswadayaan Masyarakat Desa Timpik
- f. Kader AMPL Desa Timpik
- g. Beberapa Masyarakat Desa timpik

1.8.5. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif, adalah data yang disajikan ke dalam kata yang verbal bukan dalam bentuk angka. Yang merupakan data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum tentang obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, pimpinan dan pegawai, kondisi sarana dan prasarana, formulasi kebijakan, indikator keberhasilan

implementasi kebijakan dan sebagainya.

1.8.6. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dilapangan yakni data berasal dari responden atau masyarakat. Sumber data primer adalah sumber data utama yang penulis peroleh dari penelitian di lapangan melalui beberapa informan. Informan sendiri adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi objek penelitian kepada penulis.
- b. Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang bagi data primer khususnya yang memiliki relevansi dengan topic yang dibahas. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kajian ilmiah, dokumen yang relevan dengan penelitian serta data-data dari internet yang berkaitan dengan Analisis Implementasi Program PAMSIMAS.

1.8.7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun proses dari pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik antara lain :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dengan melakukan interaksi sosial antara pencari informasi dengan pemberi informasi. Menurut Sanifah fasial dalam Sugiyono teknik observasi diklasifikasikan ke dalam tiga jenis observasi, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif. Jenis observasi partisipatif yang peneliti pilih merupakan observasi partisipatif pasif. Jadi dalam observasi ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah prses percakapan diantara dua individu atau lebih yang terarah pastinya, dimana ada pihak yang berperan menjadi pencari informasi dan pihak lainnya sebagai pemberi informasi tentang suatu hal yang akan diungkapkan. Dalam penelitian ini digunakan teknik waancara mendalam yang menurut Deddy Mulyono menjelaskan bahwa in depth interview (wawancara mendalam) adalah metode wawancara yang memungkinkan pihak yang kita waancarai dapat menjelaskan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk

menggunakan istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan pengertian dari teknik pengumpulan data dengan dokumen yaitu dokumentasi. dilihat dari asal katanya yaitu dokumen, artinya adalah barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Jadi dokumentasi yaitu data yang berbentuk benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya untuk mendapatkan informasi sesuai dengan informasi yang diperlukan peneliti.

1.8.8. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data pada penelitian telah dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah berada di lapangan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat beberapa aktivitas dalam analisis data antara lain .³⁵

1. Pengumpulan data

Tahap analisis data pertama dimulai dari tahap pengumpulan data. Proses yang satu ini dilakukan sebelum melaksanakan penelitian, pada saat penelitian, dan setelah penelitian. Pada awal penelitian kualitatif, yang dilakukan yaitu dengan melakukan *study pre-eliminatory* yang berfungsi untuk verifikasi.

³⁵Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 2008. Hlm.246-248

2. Reduksi data

Data yang didapatkan dari lapangan cukup banyak, oleh sebab itu maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Untuk itu segera dilakukan analisis melalui reduksi data.³⁶ Menurut Herdiansyah, reduksi data adalah berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menggabungkan dan mengelompokkan segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.³⁷ Dengan demikian, data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk mengumpulkan data dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman serta wawasan yang tinggi. Hasil dari wawancara, observasi, studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan yang sesuai dengan formatnya masing-masing.

3. Penyajian Data

Setelah selesai data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. *Display data* adalah mengolah data setengah yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang

³⁶ Ibid.

³⁷ Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.2010. hlm.165

jas ke dalam suatu matriks berdasarkan tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan serta akan memecahkan tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan sub tema yang diakhiri dengan kode (coding) dari sub tema tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang sebelumnya dilakukan.³⁸

Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

4. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukn bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjurus pada jawaban pertanyaan penelitian sebelumnya dan mengungkap “what” dan “how” dari penelitian tersebut. Kesimpulan secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategori dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai dengan *quote* hasil wawancara. Jika dijelaskan terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam kesimpulan atau verifikasi yaitu :

³⁸ Ibid.

- Menguraikan sub kategori tema dalam table kategori dan pengodean disertai dengan *quote* wawancara.
- Menjelaskan temuan penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan aspek/komponen/factor/dimensi dari *central phenom* penelitian.
- Membuat kesimpulan dari temuan tersebut dengan memberikan penjelasan dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

1.8.9. Kualitas Data

Untuk mengetahui keabsahan data peneliti akan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi digunakan untuk memeriksa data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi juga digunakan sebagai pembandingan terhadap data yang telah diperoleh. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data.

a. Triangulasi sumber data

Menurut Sugiyono, triangulasi sumber data ini digunakan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana dari kedua sumber data tersebut akan menghasilkan data yang tidak bisa dirata-ratakan. Oleh karena itu triangulasi sumber dilakukan untuk mendeskripsikan, mengkategorisasikan, persamaan, perbedaan, dan spesifikasi data yang diperoleh dari kedua sumber data tersebut.